REPRODUKSI SEJARAH MELALUI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Agenda Politik Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi PKB

Opini | Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.

Pada suatu pagi di Bandar Lampung, di bawah tenda putih-hijau yang dihiasi kain lambaian PKB, ratusan warga duduk mendengarkan seorang anggota DPRD Kota berpidato tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Di belakangnya terpampang

spanduk besar: *"Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan — Agung Zawil Afkar Al-Muhtadi, Anggota DPRD Bandar Lampung, Fraksi PKB."* Di akhir acara, peserta mengangkat lembaran kertas putih — entah berisi materi, sertifikat, atau sekadar tanda hadir.

Foto-foto itu bisa saja tampak biasa. Tapi bagi siapa yang membacanya dengan kritis, ada sesuatu yang lebih dalam sedang berlangsung: sebuah **reproduksi sejarah** melalui ritual ideologi.

Pancasila Sakti: Antara Ketahanan dan Sakralisasi

Istilah "Pancasila Sakti" yang terpatri dalam peringatan 1 Oktober setiap tahunnya menyimpan masalah epistemologis yang jarang dipersoalkan. Kata *sakti* membawa resonansi magis-kosmologis Jawa yang justru bertentangan dengan semangat rasional-universal yang diklaim Pancasila sendiri sebagai ideologi modern. Ketika negara menyebut Pancasila "sakti", ia sedang melakukan apa yang bisa disebut *sacralization of the political* — mengubah ideologi menjadi fetish yang tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh diperdebatkan, dan tidak boleh diuji secara kritis.

Padahal Pancasila dalam roh asalnya adalah sebuah kompromi politik yang hidup — bukan dogma yang mati. Ia lahir dari perdebatan panjang antara kelompok Islam, nasionalis, dan sosialis di tahun 1945 sebagai titik tengah yang memungkinkan bangsa yang plural ini berdiri di atas satu tanah bersama. Mengkultuskannya sebagai sesuatu yang "sakral" justru mengkhianati semangat dialektis yang melahirkannya.

Peristiwa 1965: Sejarah yang Belum Selesai

Narasi tunggal Orde Baru yang menetapkan PKI sebagai dalang G30S sekaligus pengkhianat Pancasila telah lama menjadi pondasi legitimasi kekuasaan militeristik selama 32 tahun. Namun riset historiografis dari berbagai penjuru — Ben Anderson dan Ruth McVey dari Cornell University, hingga John Roosa dalam *Dalih Pembunuhan Massal* — menunjukkan bahwa peristiwa 30 September 1965 jauh lebih kompleks dari narasi tunggal yang diajarkan di sekolah-sekolah.

Ada keterlibatan internal TNI AD sendiri yang perlu dipertanyakan. Ada permainan Soeharto yang hari ini masih gelap. Ada dimensi konflik intra-elite militer yang direduksi menjadi cerita hitam-putih "pengkhianatan komunis". Yang lebih mengejutkan secara historis: PKI justru adalah salah satu kekuatan yang pada 1945 mendukung Pancasila sebagai kompromi nasional dan menolak negara Islam. Maka narasi "pengkhianatan PKI terhadap Pancasila" bukan hanya dipertanyakan kebenarannya — ia secara historis bisa dikatakan terbalik.

Yang tidak bisa diperdebatkan adalah fakta bahwa pasca-1965, terjadi pembantaian massal antara 500.000 hingga 1 juta jiwa tanpa pengadilan. Dalam kerangka Pancasila sendiri — khususnya sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab — tragedi ini seharusnya tidak bisa dibenarkan oleh ideologi manapun, termasuk Pancasila itu sendiri.

Pancasila sebagai Benteng Anti Kolonialisme

Di tengah berbagai kritik itu, ada satu dimensi Pancasila yang secara historiografis justru paling kuat dan paling sering dilupakan: watak antikolonialnya. Soekarno membangun Pancasila bukan semata sebagai ideologi domestik, melainkan sebagai *anticolonial episteme* — sebuah penolakan terhadap dua hegemoni sekaligus: liberalisme pasar yang menjadi kendaraan kolonialisme Belanda, dan komunisme internasionalis yang tunduk pada Moskow atau Beijing.

Ini adalah momen apa yang bisa kita sebut sebagai ***Daulat Sosial*** yang autentik — kedaulatan yang lahir dari konsensus rakyat, bukan dari mandat langit maupun diktum ideologi asing. Dalam konteks inilah Pancasila menjadi genuinely revolutionary — sebuah deklarasi bahwa bangsa ini berhak mendefinisikan dirinya sendiri, tanpa harus memilih antara Barat atau Timur, kapitalisme atau komunisme.

Paradoks Pembinaan: Pancasila Siapa yang Direproduksi?

Kembali ke tenda hijau-putih di Bandar Lampung. Pertanyaan yang mendesak adalah: ketika seorang anggota DPRD dari Fraksi PKB menyelenggarakan

"Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan", Pancasila yang mana yang sedang direproduksi?

Ada paradoks besar dalam sejarah modern Indonesia yang perlu dicatat: justru rezim yang paling keras mengklaim Pancasila sebagai tameng — Orde Baru Soeharto — adalah rezim yang paling sistematis mengkhianati sila ke-2 (kemanusiaan), sila ke-4 (permusyawaratan), dan sila ke-5 (keadilan sosial) melalui pembantaian, otoritarianisme, dan ketimpangan struktural. ***Pancasila digunakan sebagai perisai sambil sila-silanya ditikam dari dalam.***

Agenda legislatif seperti yang diselenggarakan Fraksi PKB ini secara prosedural adalah bagian dari fungsi sosialisasi dan reses anggota dewan — sah secara konstitusional. Namun secara sosiologis, ia juga adalah sebuah *ritual reproduksi legitimasi ideologis*: mengulang gestur-gestur historis para pendiri bangsa, tapi kali ini dioperasikan oleh mesin partai. Ini bukan berarti salah — tapi ini perlu dibaca dengan mata terbuka.

Dalam kerangka yang pernah penulis kembangkan, ada ancaman nyata ketika ideologi publik — seperti Pancasila sebagai *res publica* — pelan-pelan diklaim, dikelola, dan dikooptasi menjadi instrumen kepentingan *res privata*: kepentingan partai, kepentingan elektoral, kepentingan patronase. Inilah yang bisa disebut sebagai kondisi ***reprivata*** — ketika ruang publik diswastakan oleh kekuatan-kekuatan yang mengklaim mewakilinya.

Catatan Akhir: Menjaga Pancasila dari Pengelolaannya

Ini bukan seruan untuk menolak pembinaan ideologi. Pancasila memang perlu dihidupi, bukan sekadar dihafalkan. Tapi menghidupinya berarti menghadapi sejarahnya yang gelap dengan jujur — termasuk 1965. Berarti membaca paradoksnya dengan kritis. Berarti tidak membiarkan ia menjadi alat legitimasi pihak manapun, baik negara, militer, maupun partai politik.

Ratusan warga yang hadir di bawah tenda itu — para orang tua, ibu-ibu berjilbab, pemuda, tokoh masyarakat — mereka bukan hanya objek sosialisasi ideologi. Mereka adalah subjek sejarah yang berhak mendapatkan Pancasila yang utuh: bukan yang sudah dipotong, disederhanakan, dan dikemas ulang demi kepentingan siklus elektoral berikutnya.

Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan apakah Pancasila sakti — tapi apakah kita cukup jujur dan berani untuk mengamalkannya. **Itulah ujian kebangsaan yang sesungguhnya.**

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P. — Peneliti independen, Bandar Lampung